

STRATEGI MOBILISASI SUMBER DAYA FUNDAMENTALISME ISLAM: STUDI HIZBUT TAHRIR INDONESIA

ARIF GUNAWAN SANTOSO*

ABSTRAK

Gerakan fundamentalisme Islam identik dengan gerakan politik struktural. Cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak sering disematkan pada gerakan ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memotret strategi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan menggunakan teori mobilisasi sumberdaya, penulis menemukan bahwa gerakan fundamentalisme, terutama HTI, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan dalam perjuangannya. HTI, selain menjalankan strategi politik struktural, juga menjalankan strategi sosial kultural. Bahkan strategi terakhir ini menjadi sumber kekuatan HTI dalam mempertahankan eksistensinya.

KATA KUNCI:

Gerakan Sosial, HTI, Islam Radikal, Syari'at Islam, Kekerasan

ABSTRACT

Islamic fundamentalist movements are often linked to radicalism and fundamentalism which is identified by the violent and coercion acts. This research portrays the strategy of Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) as one of the fundamental movement in Indonesia. By using qualitative design as the approach and resource mobilization theory as analysis tool, it is found that HTI does not utilize violence and coercion in their endeavor. Additionally, HTI employs dual approaches in promoting their ideas namely structural political strategy and socio-cultural strategy. Socio-cultural strategies become the main method of HTI in maintaining its existence.

KEY WORDS:

Social Movements, HTI, Radical Islam, Violence

A. PENDAHULUAN Latar Belakang

Gerakan fundamentalisme Islam identik dengan stereotip pejoratif.¹ Fundamentalisme diasosiasikan sebagai gerakan politis yang seringkali menggunakan aktivitas kekerasan dalam mencapai tujuannya. Selain itu, gerakan

ini juga dianggap sebagai kelompok eksklusif, intoleran, dan anti modernitas.

Di tengah stigma negatif yang disematkan ke dalam gerakan fundamentalisme Islam, gerakan ini mampu menunjukkan eksistensinya. Pada era reformasi, gerakan ini seolah mendapat momentum untuk menunjukkan eksistensi diri. Tidak hanya itu, reformasi telah menjadi media yang cukup menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan fundamentalisme.

Kemunculan fundamentalisme Islam selain ditandai oleh munculnya identitas fisik seperti penggunaan jilbab, pria berjenggot, serta identitas fisik lainnya, juga ditengarai membawa agenda

*Pelaksana pada Sekretariat Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama. Email: arifgunawan1979@kemenag.go.id

¹ Definisi fundamentalisme secara harfiah adalah konsisten dengan ajaran agama. Namun demikian, arti yang secara harfiah berkonotasi positif kemudian berubah menjadi negatif dan bersifat pejoratif. Lihat Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*:

formalisasi syari'at Islam. Gerakan fundamentalisme Islam tidak hanya bertujuan untuk melakukan purifikasi keimanan (tauhid), mereka juga menyerukan perlunya kembali pada ajaran Islam kaffah pada ranah politik, hukum, dan sosial.²

Kehadiran gerakan fundamentalisme Islam tidak hanya berhadapan dengan stigmatisasi negatif. Dalam ranah praksis mereka, termasuk HTI, sering berbenturan dengan organisasi keagamaan lainnya, bahkan pemerintah. Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua ormas Islam *mainstream* yang lebih dulu eksis, termasuk organisasi yang secara struktural berseberangan dengan agenda-agenda gerakan fundamentalisme Islam. Bahkan secara resmi, kedua organisasi tersebut telah mengeluarkan edaran internal yang memerintahkan untuk mewaspadaai keberadaan mereka.³

Di sisi lain, sikap pemerintah terhadap gerakan fundamentalisme Islam juga seringkali tidak bersahabat. Meskipun pemerintah tidak secara tegas mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang keberadaan gerakan ini, namun sikap penentangan terhadap gerakan fundamentalisme Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikembangkannya.

Sebagaimana diungkap oleh Bahrul Hayat di hadapan para peneliti di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2009. Dalam acara Temu Riset Keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat tersebut, ia menyatakan bahwa gerakan fundamentalisme Islam seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan ancaman serius. Namun demikian, menurutnya pemerintah belum punya payung hukum yang dapat menjerat maupun melarang aktivitas mereka.⁴

Seolah mengamini keresahan Bahrul Hayat, pemerintah pada tahun 2013 berusaha mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang disinyalir bertujuan untuk salah satunya membubarkan gerakan fundamentalisme Islam. Tanribali Lamo, dalam keterangannya kepada media massa menyatakan secara jelas bahwa salah satu ormas yang dapat terancam dibubarkan dengan disahkannya RUU ormas tersebut adalah HTI.⁵

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi gerakan fundamentalisme Islam, dalam hal ini HTI, untuk mempertahankan diri di tengah tekanan yang mereka alami?
2. Bagaimanakah metode perjuangan HTI dalam rangka meningkatkan dukungan dan pengaruh di masyarakat?
3. Bagaimana strategi HTI dalam memobilisasi sumber daya yang dimilikinya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui strategi yang diterapkan dalam menghadapi ancaman dan menjaga eksistensinya.
2. Mengetahui metode perjuangan yang dilakukan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mengetahui strategi HTI dalam memobilisasi sumber daya yang dimilikinya?

B. KAJIAN LITERATUR

Gerakan Fundamentalisme Islam

Istilah fundamentalisme yang secara historis lahir dari tradisi Protestan Amerika, mengalami perkembangan pemaknaan. Fundamentalisme sebagaimana diakui oleh Amstrong⁶ bukan merupakan monopoli gerakan agama tertentu.

Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 249.

²Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Sekulerisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), 119.

³Abdurrahman Wahid, Editor, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 239

⁴Dalam acara ini, penulis merupakan salah satu panitia yang mengikuti secara langsung arahan dari Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat.

⁵<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/22/mk2264-hti-terancam-dibubarkan-ini-alasannya>

⁶Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 253.

Fundamentalisme merupakan gejala yang terdapat pada seluruh ajaran agama Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Islam.⁷ Sikap militansi agama yang ditunjukkan dengan pembelaan serta keyakinan akan kebenaran doktrin-doktrin agama dapat dijumpai pada setiap pemeluk agama apapun di dunia ini.⁸ Dalam konteks agama Islam, istilah fundamentalisme memiliki makna sepadan dengan makna-makna seperti radikalisme, fundamentalisme, revivalisme, neo-fundamentalisme, puritanisme, dan terorisme.⁹ Harun Nasution menyebut gerakan garis keras ini dengan sebutan Khawarij Abad 20.¹⁰

Sebagai sebuah istilah yang lahir dalam tradisi Protestan, penggunaan istilah fundamentalisme sebagai label terhadap gerakan Islam mendapat pertentangan dari berbagai kalangan. Abde Salam Sidahmeh dan Anoushiravan Ehteshami¹¹ menolak istilah fundamentalisme Islam dikarenakan istilah ini selalu dimaknai secara pejoratif. Amien Rais pada awal tahun 1980-an dan H.A. Mu'ti Nuruddin menolak fundamentalisme disematkan kepada gerakan Islam dengan alasan bahwa terminologi tersebut bukanlah berasal dari dunia Islam melainkan berasal dari dunia Barat yang Kristen.¹² Mark Jurgen Feyer juga menolak penggunaan istilah fundamentalisme.¹³ Ia mengemukakan tiga alasan yaitu: *pertama*, istilah ini mengandung makna merendahkan yang lebih bersifat tuduhan dibandingkan sebagai sebuah penjelasan; *kedua*, istilah fundamentalisme yang lahir dari tradisi Protestan dinilai tidak tepat untuk diterapkan pada kelompok lain yang

berasal dari lintas kultural; dan *ketiga*, istilah ini tidak mencerminkan sebagai sebuah gerakan politik.¹⁴

Sementara itu, John L. Esposito, menolak terminologi fundamentalisme dengan tiga alasan.¹⁵ *Pertama*, istilah ini dapat dimaknai terlalu umum. Fundamentalisme dapat diartikan sebagai penerimaan mendasar terhadap norma-norma yang berasal dari Al-qur'an dan Sunnah yang dilakukan oleh setiap muslim; *kedua*, istilah fundamentalisme lahir dari tradisi Protestan Amerika. Makna fundamentalisme dalam tradisi ini, lebih dimaknai secara pejoratif, yaitu sikap statis dan cenderung ortodoks yang menolak modernitas dan kemajuan sains teknologi. Sementara itu, dalam konteks Islam, para fundamentalis beberapa diantaranya justru berasal dari kaum intelektual yang jauh dari kesan statis dan ortodoks; dan *ketiga*, fundamentalisme sering disejajarkan dengan aktifitas politik, ekstrimis, fanatisme, terorisme, dan anti Amerika. Selanjutnya Esposito menawarkan terminologi "Islam Revivalis" atau "aktivisme Islam" untuk menjelaskan fenomena gerakan Islam kontemporer.¹⁶ Namun demikian, Armstrong mengajukan argumentasi bahwa istilah fundamentalisme, dengan segala keterbatasannya, merupakan sebuah tipe ideal untuk menunjukkan gerakan-gerakan yang memperlihatkan kemiripan.¹⁷ Sehingga dalam pandangannya, fundamentalisme dapat diterapkan pada lintas budaya dan agama serta tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu.

Meskipun terdapat pro dan kontra penggunaan istilah fundamentalisme dalam melihat gerakan keagamaan Islam, para sarjana telah mendefinisikan fundamentalisme dengan berbagai argumen. Tidak ada satu kesepakatan di antara sarjana untuk mendefinisikan istilah ini. Zaniah Marshallsay menyatakan bahwa meskipun fundamentalisme Islam memiliki variasi yang beragam, ia menawarkan istilah fundamentalisme sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke dasar-dasar ajaran

⁷Dwi Ratnasari, "Fundamentalisme Islam," *KOMUNIKA*, Vol 4 No.1 Januari-Juni 2010. Lihat juga: Lukito, "Meninjau Ulang Fundamentalisme Kristen," 71.

⁸Muhtadi Abdul Mun'im, "Religious fundamentalism", 4. Dalam konteks inilah penyebutan istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam tulisan ini digunakan secara bersamaan dengan tanpa membedakan makna dari kedua istilah tersebut.

⁹M. Imdadun Rahmat, "Pendahuluan" dalam *Arus Baru Islam Radikal: Tradisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), xv.

¹⁰Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer.", *DINIKA* Vol.3 no. 1, Januari 2004, 4.

¹¹Abde Salam Sidahmeh dan Anoushiravan Ehteshami, *Islamic Fundamentalism* (USA: Westview Press, 1999), 2.

¹²Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik*, 251.

¹³Muhammad H. M. S., "Menelisik Sumbangan Fundamentalisme Islam bagi Kemunculan dan Perkembangan Bank Islam," *Studi Agama dan Masyarakat*, Volume I, Nomor 2, Desember 2004, 42-43.

¹⁴Syamsul Arifin, "Agama Sebagai Instrumen Gerakan Sosial", 57.

¹⁵John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, edisi ketiga (New York: Oxford University Press, 1999), 5.

¹⁶John L. Esposito, *The Islamic Threat*, 7.

¹⁷Syamsul Arifin, "Agama Sebagai Instrumen Gerakan Sosial", 48.

Islam di mana gerakan yang paling radikal dalam terminologi ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.¹⁸ Sementara itu, Bassam Tibi, Richard T Antoun dan Ian Lustick¹⁹ melihat fundamentalisme Islam lebih sebagai aktualisasi gerakan politik dibanding gerakan keagamaan. Menurut mereka, fundamentalisme Islam merupakan sebuah gerakan politik yang menggunakan dasar-dasar agama Islam untuk mencapai kekuasaan.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, setidaknya ada satu kesepakatan dalam pemaknaan istilah fundamentalisme Islam, yaitu gerakan ini merupakan gerakan sosial politik yang memiliki pandangan bahwa dasar-dasar ajaran Islam harus menjadi landasan dalam kehidupan manusia di dunia, termasuk dalam urusan perpolitikan dan kenegaraan.

Landasan teori

Quintan Wiktorowicz menawarkan paradigma teori gerakan sosial untuk meneliti dan menganalisis gerakan fundamentalisme Islam.²¹ Salah satu teori gerakan sosial yang dapat digunakan adalah teori *Resource Mobilization Theory* (RMT). Dalam perspektif RMT, gerakan sosial dilihat dari sudut pandang sosiologis.²² Teori ini memandang bahwa munculnya gerakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh ketegangan-ketegangan struktural yang terjadi dalam suatu entitas. Tidak semua ketidakpuasan psikologis yang diakibatkan oleh ketegangan struktural otomatis menghasilkan sebuah gerakan sosial. Banyak negara yang menunjukkan walaupun secara psikologis masyarakatnya mengalami

ketidakpuasan, namun kondisi tersebut tidak melahirkan gerakan sosial. Oleh karena itu, teori ini melihat sebuah gerakan sosial dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi daripada pendekatan psikologi sosial.²³

Resource Mobilization Theory menekankan pada bagaimana sebuah gerakan sosial memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pengaruhnya di masyarakat. Kepemimpinan, organisasi, dan taktik dianggap sebagai faktor dominan yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial.²⁴ Goodwin dan Jasper menekankan peran penting sumber daya ekonomi, struktur politik, organisasi formal, dan jaringan sosial bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan gerakan sosial.²⁵ Selain itu, pemanfaatan jaringan, baik struktural maupun non formal juga memberi andil dalam perkembangan suatu organisasi.²⁶

Pemanfaatan jaringan dipahami bagi sebuah gerakan sosial tidak hanya sebagai media penyebaran ide serta cita-cita dan tujuan gerakan, jaringan justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen keanggotaan. Gerakan sosial yang terlembagakan secara profesional memiliki peluang untuk memperluas jaringan dan pengaruh gerakan di tengah masyarakat. Gerakan terlembagakan dengan adanya diferensiasi-diferensiasi tugas serta tanggung jawab. Gerakan yang terlembagakan juga memberikan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat baik insentif dalam bentuk materi, solidaritas, maupun purposif.

Penelitian ini menggunakan *Resource Mobilization Theory* (RMT) sebagai pisau analisis. RMT digunakan untuk menganalisis gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memobilisasi sumber daya, menelusuri sumber daya apa saja yang dimiliki oleh HTI serta

¹⁸Zaniah Marshallsay, "Islamic Fundamentalism: Myth and Reality Confronted?" (Paper dipresentasikan pada Australian Political Studies Association Conference University of Adelaide, 29 September – 1 Oktober 2004)

¹⁹Syaifudin Kudi, "New Islamic Movement: Jejaring Fundamentalisme-Puritanisme-Revivalisme-Islamisme-Radikalisme- dan Terorisme," *REFLEKTIKA* Vol 5. Nopember 2012, 32.

²⁰Lina Khatib, "Communicating Islamic Fundamentalism as Global Citizenship", *Journal of Communication Inquiry*, 27:4 (Oktober 2003): 392.

²¹"Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 42.

²²Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Pos Kolonial* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), 229.

²³ John D. McCharty dan Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Social Movement : A Partial Theory", *The American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 Mei 1977, 1213.

²⁴ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 229.

²⁵ Jeff Goodwin dan James M. Jasper, "Introduction," dalam *Rethinking Social Movements*, editor. Jeff Goodwin dan James M. Jasper, *People, Passions, Power: Social Movements, Interest Organizations, and the Political Process* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004), vii.

²⁶ Janine A. Clark, "Fundamentalist Women in Yemen: Informal Nodes of Activism," dalam *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*, editor: Quintan Wiktorowicz (Indianapolis: Indiana University Press, 2004), 166.

bagaimana HTI merumuskan strategi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Gerakan Islam radikal yang memiliki tujuan formalisasi syariat Islam oleh negara telah menarik perhatian para peneliti dan akademisi. Beberapa penelitian yang menjadikan Hizbut Tahrir sebagai objek kajian di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zeyno Baran. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2004 dan kemudian dipublikasikan dengan judul "*Hizb at-Tahrir: Islam's Political Insurgency*"²⁷, memberikan simpulan bahwa Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan fundamentalisme struktural yang berorientasi pada pembentukan Negara Islam. Dalam strateginya, meskipun tidak terbukti terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan, namun HT memberikan kontribusi secara tidak langsung dalam aktivitas terorisme dan aktivitas kekerasan atas nama agama. Baran menyebut bahwa HT telah berperan sebagai *conveyort belt* dengan memberikan landasan ideologis, memberikan inspirasi, dan menumbuhkan tindakan terorisme.

Akademisi lain yang melakukan penelitian dengan objek yang sama adalah Burhanuddin Muhtadi. Dipublikasikan dengan judul *The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia*²⁸, Muhtadi menyoroti pandangan HTI terhadap konsep negara bangsa dan demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa HTI menolak kedua konsep dan ide tersebut. Penolakan tersebut didasari pada pemahaman bahwa konsep kenegaraan berdasarkan Islam adalah konsep negara dengan bentuk khilafah.

Sementara itu, HTI juga berpandangan bahwa demokrasi, yang dewasa ini sedang diadopsi dan dikembangkan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dianggap bertentangan dengan Islam. Penolakan terhadap kedua ide dan pemikiran tersebut, menurut Muhtadi merupakan sikap yang dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia.

Mohamed Nawab Mohamed Osman, akademisi dari Malaysia juga melakukan

penelitian terhadap HTI. Penelitian yang dipublikasikan dengan judul *Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia*²⁹ menemukan bahwa HTI merupakan gerakan yang mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Meskipun jumlah pengikutnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah pengikut NU dan Muhammadiyah, namun ia berpendapat bahwa HTI berhasil mengangkat isu khilafah menjadi tema yang diperbincangkan masyarakat luas.

Osman meragukan pendapat bahwa HTI merupakan gerakan radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan. Meskipun tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam dakwahnya, ia menyatakan bahwa ide yang dibawa oleh kelompok ini merupakan ide yang paling radikal dibandingkan dengan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh gerakan Islam lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pada tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui dua cara yaitu: studi literatur dan pengamatan lapangan. Tulisan baik berupa buku, naskah, jurnal, bulletin, media, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia dijadikan sebagai sumber data. Tulisan tidak hanya diambil dari kalangan internal, tetapi juga tulisan yang ditulis oleh *outsider*.

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak yang dianggap representatif. Beberapa narasumber diantaranya adalah: Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto; Ketua DPD II HTI Bekasi Raya; dan beberapa anggota senior HTI

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014. Objek penelitian adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), khususnya pengurus HTI pusat dan HTI Bekasi Raya. Pemilihan lokasi penelitian semata-

²⁷ Zeyno Baran, *Hizb at-Tahrir: Islam's Political Insurgency* (Washington DC: The Nixon Center, 2000)

²⁸ Burhanuddin Muhtadi, "The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia," *Asian Journal of Sosial Science*, 37, 2009.

²⁹ Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia", *Terrorism and Politic Violence*, 22, tahun 2010. 601-622.

mata karena pertimbangan bahwa karakteristik HTI di setiap tempat memiliki kesamaan. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa meskipun penelitian dilakukan pada HTI pusat dan HTI Bekasi Raya, dapat dijadikan sebagai parameter dalam melihat HTI secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Berbagai data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diklasifikasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan. Triangulasi data dilakukan untuk menguji konsistensi dan keakuratan data. Teori gerakan sosial, terutama *Resource Mobilization Theory* (RMT) digunakan sebagai pisau analisis.

D. TEMUAN PENELITIAN

1. Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan Islam yang berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds Palestina. Pendirinya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al Azhar Mesir yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina. HT memperkenalkan dirinya sebagai Partai Politik Islam. Aktivitasnya adalah politik dan asas atau ideologinya adalah Islam.³⁰ Sejarah berdirinya tidak dapat dilepaskan dari kiprah pendirinya yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

Sebagai partai politik internasional, struktur organisasinya tidak dibatasi oleh-sekat-sekat negara bangsa. Meski telah berkembang dan menyebar di lebih dari 45 negara³¹, namun sktruktur kepengimpinannya tetap terpusat pada satu *amir* sebagai pengendali tertinggi organisasi. Keberadaannya di berbagai negara hanya sebagai "cabang" dari HT yang berpusat di Yordania.³²

Posisi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bagian dari HT secara keseluruhan.³³ Dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang berarti, terutama dalam hal ide, tujuan, dan strategi, antara HTI dengan HT. Penambahan istilah "Indonesia" pada HT yang bergerak di Indonesia

hanya menunjukkan struktur "kewilayahan". Dengan kata lain HTI dapat dimaknai sebagai Hizbut Tahrir "wilayah" Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir yang melakukan aktivitas dan pergerakan di Indonesia.

Struktur administrasi HTI dipimpin oleh sejumlah *majelis al-wilayah* yang dipilih oleh anggota.³⁴ *Majelis al-wilayah* dipimpin oleh satu orang yang dipilih langsung oleh *amir* HT. Mekanisme pemilihan *mu'tamad* yang langsung dipilih oleh *amir* HT membenarkan kecurigaan Fealy³⁵ bahwa HTI merupakan satu-satunya gerakan Islam yang dikontrol oleh kepemimpinan asing.³⁶

2. Sumber Daya HTI

Sebagaimana disampaikan Goodwin dan Jasper, terdapat empat hal yang berperan dalam perkembangan gerakan sosial. Keempat hal tersebut adalah sumber daya ekonomi (kekuatan finansial), organisasi formal, struktur politik, dan jaringan sosial.³⁷

Keempat hal diatas dapat diklasifikasikan dalam sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal terdiri dari kekuatan finansial dan organisasi formal, sementara itu sumber daya eksternal terdiri dari struktur politik dan jaringan sosial.

Dalam hal sumber daya internal, sebagaimana diakui oleh Ismail Yusanto, HTI

³² Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

³³ Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Chaliphate in the Nusantara", *Terrorism and Politic Violence*, 22, tahun 2010, 604.

³⁴ Anggota *majelis a-wilayah* diebut *mu'tamad*.

³⁵ Mohamed Nawab Mohamed Osman "Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia", 602.

³⁶ Menanggapi hal ini, Juru Bicara HTI menyatakan bahwa sesungguhnya HTI merupakan organisasi yang otonom. HTI memiliki keleluasaan dalam mengatur dan membuat program dan kegiatan secara mandiri. Namun di sisi lain, sebagaimana diakui oleh Dwijo Abu Ibad, anggota senior HTI kota Bekasi, kekuatan Hizbut Tahrir di seluruh dunia adalah adanya satu kesatuan pemikiran. Sehingga dengan demikian, keterikatan HTI terhadap pemikiran Hizbut Tahrir Internasional merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa HTI merupakan organisasi yang berada di bawah kontrol dan penguasaan asing. (Wawancara dengan Dwijo Abu Ibad, Anggota Senior HTI Kota Bekasi di Bekasi, Sabtu 16 Mei 2014)

³⁷ Jeff Goodwin dan James M. Jasper, "Introduction," dalam *Rethinking Sosial Movements*, editor. Jeff Goodwin dan James M. Jasper, *People, Passions, Power: Sosial Movements, Interest Organizations, and the Political Process* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004), vii.

³⁰ Abdurrahman Wahid menyebut ideologi seperti ini sebagai ideologi totalitarian-sentralistik. Lihat Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, 120.

³¹ Mohamed Nawab Mohamed Osman "Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia", *Terrorism and Politic Violence*, 22, tahun 2010, 601.

hanya mengandalkan pendanaan dari kalangan internal aktivisnya.³⁸ Mereka tidak menerima sumbangan dari pihak lain, baik dari perorangan, organisasi, maupun pemerintah. Meskipun demikian, Mateen Siddiqui memiliki kecurigaan bahwa Arab Saudi-lah yang memberikan andil dalam pendanaan awal gerakan ini.³⁹

Dampak dari pembatasan penerimaan dana, HTI selalu memungut biaya bagi para peserta akbar yang diselenggarakannya. Sebagaimana yang pernah diikuti oleh penulis, dua kegiatan besar HTI yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada tahun 2013 dan 2015, selalu memungut biaya kepada peserta melalui tiket yang dijual.

Sumber daya internal HTI yang paling utama adalah kekuatan organisasi formal. HTI merupakan salah satu gerakan fundamentalisme di Indonesia yang memiliki struktur organisasi yang tertata secara rapi. Selain itu, mereka juga memiliki program dan kegiatan yang cukup banyak.

Dalam hal sumber daya eksternal berupa struktur politik dan jaringan organisasi, fakta memperlihatkan bahwa sumber daya ini memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan HTI. Struktur politik yang demokratis dan terbuka pasca reformasi, secara langsung memberikan keuntungan bagi HTI untuk menyebarluaskan ide dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Keterbukaan dan keleluasaan HTI dalam menyampaikan ide dan pengaruhnya di masyarakat juga berdampak pada meluasnya jaringan yang berhasil diraih oleh HTI.

Hal yang menarik dari upaya pembentukan jaringan yang dilakukan oleh HTI adalah mereka tidak menggunakan cara-cara pembentukan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang lazim dilakukan oleh gerakan keagamaan Islam. Ketika Wiktorowicz menjelaskan bahwa gerakan sosial keagamaan seperti layanan kesehatan dan pendidikan digunakan oleh gerakan Islam⁴⁰, HTI

justru menghindari sikap itu dengan menyatakan bahwa sebagai partai politik, aktivitas sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendirian lembaga pendidikan merupakan hal yang terlarang. Mereka lebih memilih strategi “infiltrasi” ke dalam lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan melalui diskusi dan silaturahmi kepada pimpinan lembaga tersebut (upaya HTI dalam meraih dukungan kelembagaan dan membuat jaringan, dijelaskan pada tulisan selanjutnya).

3. Strategi dan Pola Mobilisasi HTI

Mobilisasi sumber daya HTI dipengaruhi dan ditentukan oleh konsep perubahan dan metode yang diadopsi. Mereka mendefinisikan perubahan yang menjadi tujuannya dengan istilah *inqilabi*, yaitu perubahan mendasar dan sertamerta.⁴¹ Perubahan yang sifatnya *inqilabiyyah* hanya dapat dilakukan jika adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat dan *ahlul quwwah*.⁴² Oleh karena itu, prasyarat untuk melakukan perubahan sistem kenegaraan secara mendasar dan menyeluruh mengharuskan adanya kesiapan, baik dari aspek masyarakat maupun aspek *ahlul quwwah*.

Selain konsep perubahan, faktor lain yang mempengaruhi pola gerakan HTI adalah konsep *tariqah* dan *uslub*. Mereka membedakan antara metode/strategi (*tariqah*) dan teknik/tata cara (*uslub*).⁴³ *Tariqah* adalah tata cara yang sifatnya tetap dan tidak akan berubah.⁴⁴ Hal ini dikarenakan *tariqah* disusun dan ditetapkan berdasarkan dalil.⁴⁵ Mereka berargumen bahwa

³⁸Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto di Jakarta, 10 Maret 2014.

³⁹Mateen Siddiqui, “The Doctrine of Hizb ut-Tahrir” dalam *The Challenge of Hizbut-Tahrir: Deciphering and Combining Radical Islamist Ideologi*, editor Zeyno Baran (Washington: The Nixon Center, 2004), 6.

⁴⁰Quintan Wiktorowicz, “Pendahuluan: Aktiwisme Islam dan Teori Gerakan Sosial,” dalam *Aktiwisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012),

⁴¹Metode ini berbeda dengan metode yang ditetapkan oleh al Maududi maupun al Banna. lihat Mohamed Nawab Mohamed Osman, “Reviving the Chaliphate in the Nusantara”, 602.

⁴²Yang dimaksud sebagai *ahlul quwwah* adalah para pemegang kekuasaan. Mereka adalah orang atau kelompok yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi negara. HTI mengidentifikasi bahwa *ahlul quwwah* terdiri dari dua kelompok (Wawancara dengan Juru Bicara HTI)

⁴³Wawancara dengan Abu Umar. Ketua DPD II HTI Kota Bekasi. Wawancara dilakukan melalui telpon pada tanggal 22 Mei 2014.

⁴⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb at-Tahrir*, cetakan ke-4 (Beirut: Hizbut Tahrir, 2001), 57-59.

⁴⁵Dengan berdasarkan hadits yang berbunyi “dana apa saja yang dibawa oleh Nabi maka ambillah dan apa saja yang dilarang nabi jauhilah”, HTI berpendapat bahwa seluruh perilaku nabi yang bukan merupakan kekhususan bagi beliau harus diikuti, termasuk dalam hal bagaimana nabi menjalankan dakwahnya di kota Mekah sampai berhasil mendirikan negara di Madinah. Wawancara dengan Dwijo Abu Ibad, Anggota Senior HTI Kota Bekasi di Bekasi, Sabtu 16 Mei 2014

dalam membentuk masyarakat Islam dan negara Islam, Nabi Muhammad telah menunjukkan tata caranya/*tariqah*-nya. Oleh karena itu, ketika akan membentuk institusi negara Islam, maka ia harus mencontoh dan mengikuti tata cara yang dilakukan oleh nabi.

Tariqah tersebut akan berlaku pada kondisi dan situasi apapun, serta akan terus menjadi metode baku selama tidak ditemukan dalil yang dianggap lebih kuat. Itu artinya, satu-satunya kondisi yang memungkinkan untuk merubah strateginya hanyalah jika ada pihak yang mampu meyakinkan kepada HTI bahwa terdapat dalil yang lebih kuat yang membahas masalah metode serta tahapan-tahapan yang harus ditempuh.

Dalam konteks penerapan syari'at Islam, HTI berpendapat bahwa hanya melalui sistem Khilafah-lah syari'at Islam dapat diterapkan secara sempurna. Mereka menjadikan khilafah sebagai satu-satunya *tariqah* dalam menerapkan syari'at Islam. Dengan pemahaman seperti ini, mereka menolak sistem kenegaraan lain seperti kerajaan, presidensial, republik, dan system selain khilafah. Bagi mereka, selain khilafah merupakan sistem kenegaraan yang batil dan bertentangan dengan syari'at Islam.

Berbeda dengan *tariqah*, *uslub* didefinisikan sebagai teknik menempuh strategi yang dapat berubah. Implementasi *uslub* dapat berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. *Uslub*-pun juga dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Jika *tariqah* digali berdasarkan dalil dan hukumnya bersifat tetap dan wajib diikuti sesuai dengan dalil tersebut, maka *uslub* berstatus hukum mubah, dapat dilakukan dan dapat pula ditinggalkan.

Abu Umar, Ketua DPD II HTI Bekasi Raya, mencontohkan perbedaan antara *tariqah* dan *uslub* yaitu HT mengadopsi bahwa salah satu tahapan dalam dakwah adalah interaksi dengan masyarakat (*tafa'ul ma'al ummah*).⁴⁶ Dalam hal ini, berinteraksi dengan masyarakat merupakan *tariqah* yang harus dilewati dan dijalani, namun bagaimana cara untuk melakukan interaksi, apakah dengan menggunakan teknik demonstrasi, konferensi, muktamar, atau teknik lainnya, hal demikian merupakan bagian dari

⁴⁶ Wawancara dengan Abu Umar, Ketua DPD II HTI Bekasi Raya. Wawancara dilakukan melalui telepon pada tanggal 22 Mei 2014.

uslub.

Berdasarkan gambaran di atas, secara teori sulit mengharapakan HTI dapat merubah tujuan dan metode dalam memperjuangkannya. Fakta ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana diketahui, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah disepakati sebagai bentuk kenegaraan yang final dan mengikat. Dengan kata lain, sistem khilafah yang diusung oleh HTI, secara politis bertolak belakang dengan konsensus tersebut. Sementara di sisi lain, HTI menolak bentuk kenegaraan selain khilafah sebagai media penerapan syari'at Islam.

4. Diversifikasi dan Spesialisasi Sumber Daya

Salah satu komponen yang berperan dalam keberhasilan gerakan adalah kemampuan organisasi untuk melakukan diferensiasi kelembagaan dan profesionalitas partisipan.⁴⁷ Struktur kepengurusan memegang peranan penting dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana Hamas di Palestina, HTI merupakan gerakan kelembagaan dan tidak terikat pada ketokohan pemimpinnya.⁴⁸ Sebagai gerakan kelembagaan, peran struktur lembaga serta ide dan pemikiran yang diadopsi mengambil porsi yang dominan di dibandingkan dengan kharisma ketokohan.

Dalam HTI, dikenal adanya struktur administratif dan struktur fungsional. Struktur administratif bertanggungjawab terhadap keberlangsungan dakwah baik yang sifatnya syi'ar ke luar maupun agenda-agenda yang bersifat pembinaan ke dalam. Agenda dakwah yang dilakukan harus mengacu pada *tariqah* yang telah ditetapkan. Dakwah pemikiran, politis, dan tanpa kekerasan merupakan *tariqah* yang harus selalu menjadi ciri utama.

Selain bertugas dan berkewajiban untuk mengorganisir agenda dakwah yang sifatnya publik, struktur administratif juga memiliki tugas

⁴⁷ Quintan Wiktorowicz, "Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 57.

⁴⁸ Glenn E Robinson, "Hamas Sebagai Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 242-243.

dan tanggung jawab untuk mengelola agenda dakwah internal. Agenda dakwah internal dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan bagi para anggota dan simpatisan (*shabab*). Sebagaimana argumen Tugal⁴⁹, salah satu karakter dasar gerakan Islam adalah keseriusan mereka dalam membentuk budaya yang bercirikan Islam pada masyarakat. Menurutnya, gerakan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, namun ia memiliki kepentingan untuk membentuk gaya hidup yang dimanifestasikan dalam kehidupan keseharian berdasarkan pemahaman tertentu, dalam hal ini Islam.⁵⁰

Melalui mekanisme *halaqah*, para *shabab* dibentuk pola pikir dan pola sikapnya. Mereka dididik dan dibina dengan pemikiran Islam. Tidak hanya itu, aktivitas keseharian mereka tidak luput dari perhatian dan pantauan. Otoritas yang paling bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pembinaan dan pengkaderan internal berada pada pengurus struktural (struktur administratif). Dalam hal ini, *halaqah* menjadi bukti keseriusan HTI dalam mendidik, membina, dan membentuk partisipan organisasi.

Dalam pandangan Rijal, *halaqah* merupakan media yang dimanfaatkan oleh HTI untuk melakukan indoktrinasi kepada partisipan. Setidaknya ada dua alasan yang disampaikan. *Pertama*, *halaqah* menjadi media indoktrinasi karena dalam forum ini menisbikan cara berfikir kritis. *Kedua*, cara indoktrinasi dilakukan dengan menggunakan sumber rujukan yang hanya berasal dari kitab karya pendiri HT dan HT secara institusi tanpa ada buku atau kitab pembanding.⁵¹

Struktur fungsional di dalam HTI dikenal dengan sebutan *lajnah*, yaitu sebuah divisi khusus dimana para anggotanya terdiri dari anggota dengan latar belakang tertentu.⁵² *Lajnah* dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi.⁵³ Ia tidak bersifat permanen, dapat berubah dan

berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. *Lajnah* merupakan struktur tersendiri yang berada di luar struktur administratif. Para anggotanya berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan struktur fungsional di atasnya. Mereka menjadi garda terdepan dalam melakukan kontak dan interaksi dengan para *ahlul quwwah*.

Berbeda dengan struktur administratif, *lajnah* hanya bertugas untuk melakukan interaksi dan diskusi dengan target dakwah. Mereka tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dengan bahasa lain, para anggota *lajnah* hanya bertugas memperkenalkan ide-ide dan pemikiran HTI kepada objek dakwah. Jika objek dakwah tersebut tertarik dan ingin mengkaji lebih intensif, maka keinginan mereka akan ditindaklanjuti oleh struktur administratif.

Keberadaan *lajnah* menunjukkan bahwa HTI memiliki keseriusan untuk menggarap seluruh segmen masyarakat. Mereka melakukan diversifikasi dan spesialisasi. Mereka memanfaatkan berbagai sumber daya dari berbagai latar belakang untuk keperluan organisasi.

Kemampuan menggerakkan sumber daya yang dimilikinya tak lepas dari keikhlasan *shabab*-nya. Mereka bersedia melaksanakan perintah organisasi tanpa mendapatkan imbalan sedikitpun. Bahkan mereka tak jarang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalankan tugas organisasi.⁵⁴ Pengorbanan yang mereka lakukan merupakan bentuk manifestasi dari doktrin bahwa apa yang mereka lakukan adalah kewajiban agama. Sebuah doktrin yang menjadi ciri khas setiap gerakan yang mengatasnamakan agama, terutama Islam.

Melihat bagaimana HTI menyusun struktur organisasinya serta melakukan diversifikasi sumber daya, terlihat bahwa gerakan ini cukup serius dalam mengelola organisasi. Meskipun bagi sebagian kalangan ide mendirikan negara khilafah dinilai sebagai cita-cita yang utopis, namun tidak menyurutkan langkah mereka dalam mengelola dan menggerakkan sumber daya organisasi.

Sebagai sebuah gerakan sosial yang bergerak di bidang keagamaan, mereka mampu

⁴⁹ Cihan Tugal, "Transforming Everyday Life: Islamism and Social Movement Theory", *Theory and Society*, Volume 38, Issue 5, September 2009, 31.

⁵⁰ Cihan Tugal, "Transforming Everyday Life," 428.

⁵¹ Syamsu Rijal, "Indoctrinating Muslim Youth: Seeking Certainty Through An-Nabhani", *Al-Jami'ah*, Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432 H, 264.

⁵² Wawancara dengan Abu Umar. Wawancara dilakukan melalui telpon pada tanggal 22 Mei 2014.

⁵³ Wawancara dengan Abu Umar. Wawancara dilakukan melalui telpon pada tanggal 22 Mei 2014.

⁵⁴ Wawancara dengan Miqdad Ali Azka. Wawancara dilakukan di Bekasi hari Minggu, 17 Mei 2014.

menjadikan doktrin perjuangan suci sebagai motor gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Islam mampu mengabaikan peran keuntungan materi sebagai faktor utama gerakan.

5. Mempersiapkan Masyarakat dan *Ahlul Quwwah*

Sebagaimana disampaikan di atas, prasyarat adanya perubahan sistem kenegaraan yang diinginkan adalah kesiapan masyarakat dan *ahlul quwwah*. Dengan kata lain, HTI tidak akan pernah mampu mencapai tujuannya jika kedua prasyarat tersebut dianggap belum memadai. Bahkan menurut Juru Bicara HTI, mereka haram mengambil alih kekuasaan jika salah satu aspek belum siap.⁵⁵ Ia beralasan bahwa jika salah satu aspek belum siap dan menerima ide perubahan, maka potensi adanya konflik sangat besar dan akan ada korban yang berjatuh, baik dari pihak masyarakat maupun *ahlul quwwah*. Beranjak dari konsep tersebut, HTI bergerak dan melakukan aktivitas yang menjadikan masyarakat umum dan *ahlul quwwah* sebagai objek dakwah.

a. Mempersiapkan Masyarakat melalui Aktivitas *Shabab* dan Pembinaan Umum

Interaksi antara *shabab* dengan masyarakat menjadi aktivitas menonjol. Abu Umar menjelaskan bahwa aktivitas utama mereka adalah melebur ke tengah-tengah masyarakat, berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat.⁵⁶ Mereka menyebut aktivitas ini dengan *ittisal maksudah* (kontak ke masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan). Aktivitas ini, menurut Baran, merupakan aktivitas utama dalam perekrutan anggota.⁵⁷

Para *shabab* berinteraksi dengan maksud untuk memahamkan masyarakat dengan ide dan pemikiran. Mereka berusaha menyadarkan masyarakat atas apa yang sekarang menimpa kaum muslimin. Interaksi yang dilakukan para *shabab* tidak hanya membangun kesadaran masyarakat, tetapi juga membangun kedekatan personal. Kedekatan personal dalam bentuk

persahabatan, kekerabatan, hubungan keluarga dan kedekatan personal lainnya-lah yang menjadi salah satu kunci suksesnya mereka menarik masyarakat menjadi partisipan.

Selain kedekatan personal, kesabaran para *shabab* dalam berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat membawa pengaruh signifikan dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Seperti disampaikan Abah Qayyum, yang merupakan ulama kharismatik asal Kabupaten Malang. Ia mengatakan bahwa pada mulanya ia memiliki pemahaman negatif terhadap HTI. Berdasarkan informasi yang diterima, ia mengambil kesimpulan bahwa gerakan HTI merupakan gerakan yang sesat. Kemudian pemahamannya itu mulai berubah semenjak dirinya aktif dikontak oleh Abu Ridha aktivis HTI Kota Malang pada tahun 2008.

Menurut pengakuannya, perubahan pemahaman yang terjadi padanya tidaklah berjalan secara instan. Ia menuturkan bahwa berbekal pandangan negatif tentang HTI, pada awal-awal kontak, ia tidak memberi respon terhadap silaturahmi yang dilakukan. Berbagai media yang diberikan kepadanya-pun hanya diletakkan begitu saja tanpa ia sentuh. Namun, berdasarkan pengakuannya, respon dingin yang beliau berikan mulai berubah seiring kesabaran dan keistiqamahan Abu Ridha. Butuh waktu dua tahun baginya untuk dapat menerima ide dan pemahaman HTI.⁵⁸ Kesabaran para aktivis HTI juga diakui oleh Abah Enthous. Ulama yang bernama asli KH Tubagus Zaenul Arifin adalah Musytasyar PWNU Banten.⁵⁹

Optimalisasi peran *shabab* juga dimaksudkan untuk memperluas jaringan dengan mengedepankan kedekatan personal. Jaringan informal merupakan salah satu ciri utama gerakan Islam.⁶⁰ Jaringan tidak hanya sebagai sarana yang paling praktis dalam membentuk gerakan. Ia juga

⁵⁸ *Media Umat*, "Abah Qayyum, Ulama dari Malang: Dulu Benci Kini Cinta," <http://mediaumat.com/sosok/3989-93-abah-qayyum-ulama-dari-malang-dulu-benci-kini-cinta.html>. Diakses tanggal 11 Juni 2014.

⁵⁹ *Media Umat*, "Mengambil Jalan Perjuangan", <http://mediaumat.com/sosok/5437-125-mengambil-jalan-perjuangan.html>. Diakses tanggal 11 Juni 2014.

⁶⁰ Quintan Wiktorowicz, "Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 65.

⁵⁵ Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto di Jakarta, 10 Maret 2014.

⁵⁶ Wawancara dengan Abu Umar. Wawancara dilakukan melalui telepon pada tanggal 22 Mei 2014.

⁵⁷ Zeyno Baran, *Hizb-ut Tahrir: Islam's Political Insurgency*, 85.

berperan dalam membentuk identitas kolektif gerakan. Keaktifan mereka pada perkumpulan-perkumpulan keagamaan maupun non keagamaan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarkan ide dan pemikiran HTI.

Masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam menjadi salah satu media informal yang berperan penting dalam penyebaran ide dan pemikiran HTI. Fungsi masjid yang strategis sebagai tempat pelaksanaan peribadatan menjadi media yang lazim digunakan bagi gerakan Islam dalam mengembangkan pengaruhnya.⁶¹ Masjid sebagai “ruang bebas” juga menjadi tempat yang paling aman untuk menghindari sikap represi pemerintah.⁶² Robinson menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, pemerintah tidak berani melakukan konfrontasi secara langsung dengan masjid. Masjid kampus menjadi fenomena global dalam perannya menjadi sarana pengembangan gerakan-gerakan Islam.⁶³

Jaringan informal juga dimanfaatkan dalam peningkatan dukungan di kalangan mahasiswa. Para aktivis HTI memanfaatkan perkumpulan mahasiswa daerah rumah kontrakan bagi mahasiswa untuk menyebarkan ide dan pemikirannya. Rumah Binaan (Rubin)⁶⁴ menjadi salah satu fasilitas bagi para *shabab* untuk “menjerat” calon anggota baru. Rubin berupa sebuah rumah kontrakan/kost yang dikelola secara mandiri oleh para *shabab*. Rubin diisi oleh satu atau dua orang mahasiswa senior yang telah

aktif di HTI.⁶⁵ Dengan memanfaatkan senioritas dan peraturan Rubin yang telah dibuat sebelumnya, para mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh senior. Melalui mekanisme inilah mereka mendapatkan tambahan dukungan di kalangan mahasiswa.

Tidak hanya membentuk jaringan-jaringan baru, mereka juga memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah terbangun sebelumnya. Salah satu jaringan yang dimanfaatkan secara optimal adalah jaringan ulama dan pimpinan pondok pesantren.⁶⁶ Para ulama yang sudah bergabung bersama HTI dioptimalkan peran dan fungsinya untuk menyebarkan pengaruhnya di kalangan ulama. Sebagaimana pengakuan Abah Enthuis, ia bertekad untuk memanfaatkan jaringan keulamaan, khususnya di wilayah Banten, untuk memperkenalkan dan meluruskan kesalahpahaman umat terhadap HTI.⁶⁷

Sejauh pengamatan, penyebaran pengaruh HTI melalui jaringan ulama menjadi salah satu kunci berkembang pesatnya dukungan masyarakat. Mobilisasi jaringan ulama dapat dilihat dari keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan *Liqo Syawal Ulama* (LSU). LSU diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan dihadiri oleh para ulama beserta jamaahnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan di berbagai daerah dengan jumlah partisipan yang beragam. Daerah yang menampakkan peningkatan partisipasi ulama secara signifikan setidaknya terdapat pada Banten dan Jawa Timur.

Jaringan informal yang dibentuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Jaringan ini juga mampu merubah simpatisan menjadi partisipan aktif gerakan.

⁶¹ Quintan Wiktorowicz, “Pendahuluan: Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial,” dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 58-59.

⁶² Gwenn Okruhlik, “Membuat Perbincangan Diiijinkan: Islamisme dan Reformasi di Arab Saudi,” dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 567.

⁶³ Carrie Rosefsky Wickham memaparkan berdasarkan penelitian tentang Islam di Mesir yang ia lakukan, ia menemukan peranan sentral masjid kampus dan organisasi kampus. Kedua lembaga tersebut dijadikan oleh kelompok Islamis untuk menyebarkan ide dan pemikirannya. Lihat: Carrie Rosefsky Wickham, “Kepentingan, Gagasan, dan Dakwah Kelompok Islamis di Mesir,” dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012), 515.

⁶⁴ Kampus IPB Bogor merupakan salah satu lokasi yang terdapat cukup banyak rumah binaan.

⁶⁵ Penulis pada masa awal perkuliahan di IPB Bogor termasuk menjadi salah satu mahasiswa baru yang tinggal di rumah binaan (rubin) yang dikelola oleh mahasiswa senior yang sudah bergabung bersama HTI.

⁶⁶ Khusus untuk jaringan Ulama, HTI tidak hanya membentuk jaringan secara personal. Mereka juga memanfaatkan lembaga resmi negara, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peran mereka dalam MUI dapat dilihat ketika dilaksanakan Kongres Umat Islam Indonesia ke-4 yang diselenggarakan oleh MUI di kota Jakarta. Dalam kesempatan ini, HTI berhasil memasukkan agendanya dalam “Deklarasi Jakarta” yang dihasilkan, yaitu formalisasi syarat Islam. Lihat Mohamed Nawab Mohamed Osman, “Reviving the Chaliphate in the Nusantara, 613.

⁶⁷ *Media Umat*, “Mengambil Jalan Perjuangan”.

Kedekatan personal yang dibangun berdasarkan jaringan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi masyarakat untuk menjadi partisipan aktif. Fakta ini semakin menguatkan bahwa jaringan informal dalam memperbesar dukungan dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan.⁶⁸

Selain melakukan *ittisal maksudah* yang dilakukan oleh setiap anggota, mereka juga merancang berbagai kegiatan umum. Kegiatan biasanya diselenggarakan oleh kepengurusan HTI mulai dari tingkat Pusat, DPD I, DPD II, maupun DPC pada masing-masing wilayah dengan berbagai model. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan seminar, konferensi, maupun diskusi terbatas yang diikuti para tokoh masyarakat. HTI juga aktif menyebarkan ide dan pemikirannya melalui berbagai media. Beberapa diantaranya adalah melalui media cetak⁶⁹ dan internet yang beralamat di <http://www.hizbut-tahrir.or.id>.

Mekipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh HTI, namun nampak bahwa harapan mereka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas belum tercapai. Sampai saat ini, HTI belum mampu menyaingi eksistensi dua organisasi besar, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa HTI mampu mengangkat ide syar'i.

b. Mempersiapkan *Ahlul Quwwah* melalui *Talab an-Nusrah*

Salah satu aktivitas paling penting bagi perubahan yang dicita-citakan adalah *talab an-nusrah*. Aktivitas ini dilakukan untuk mencari pertolongan dakwah kepada para penguasa, politisi, militer, dan tokoh lainnya.⁷⁰ Ini merupakan aktivitas yang paling problematik di antara aktivitas lainnya. Hal ini karena *talab an-nusrah* merupakan aktivitas yang secara logika

sulit sekali untuk dimengerti. Bagaimana mungkin mereka meminta pertolongan dan perlindungan dakwah kepada para penguasa sementara di sisi lain mereka memposisikan diri sebagai pihak yang kontra terhadap penguasa.

Meskipun terkesan sangat problematik, HTI tetap melaksanakan dakwah mencari pertolongan kepada *ahlul quwwah/ahlu an-nusrah* (sebutan bagi pihak yang memberikan pertolongannya kepada HTI). Sebagaimana pengakuan Miqdad, tugas ini, terutama dakwah terhadap militer, dilakukan oleh satuan gugus tugas yang langsung ditunjuk oleh *amir* HT dan bergerak secara rahasia⁷¹. Sebagai bukti kerahasiaan gugus tugas ini, tidak ada anggota HTI yang mengetahui siapakah yang mendapatkan amanah untuk melakukan tugas ini.

Namun demikian, selain bergerak secara rahasia, secara formal kepengurusan HTI di tingkat DPP sampai DPC terkesan sangat aktif melakukan kunjungan kepada penguasa militer baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan strategi ini, mereka mampu menjalin hubungan dengan pihak penguasa, termasuk militer. Bahkan beberapa petinggi militer di Indonesia memberi apresiasi, sebagaimana disampaikan oleh Danlanud Abdulrahman Saleh yang menyatakan bahwa pandangan HTI sangat visioner.⁷² Meskipun tanggapan positif disampaikan oleh beberapa pimpinan militer, tentu indikasi ini tidak dapat dijadikan ukuran sejauh mana penerimaan militer, baik secara institusi maupun perorangan dalam menerima dan mendukung perjuangan HTI.

Sikap dukungan secara nyata dari pihak militer baik secara institusi maupun personal memang sulit untuk diketahui. Dari pihak militer, dukungan resmi terhadap lembaga-lembaga maupun ormas yang terdaftar secara resmi merupakan sikap yang normatif. Tidak mencerminkan sikap sesungguhnya. Sementara itu, dari publikasi-publikasi HTI, dukungan dari pihak militer juga disajikan dalam bentuk

⁶⁸ Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Sosial Movement: An Introduction*, edisi kedua (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), 117-118.

⁶⁹ Media cetak yang diproduksi oleh HTI diantaranya adalah: *Majalah Al-Wa'ie*, *Tabloid Media Umat*, *Bulletin Al-Islam* dan *Cermin Wanita Sholihah*. Selain media yang secara resmi dikelola oleh HTI, individu anggota HTI juga secara aktif menyebarkan berbagai ide dan pemikiran HTI melalui lembaga-lembaga persegitakian seperti *Pustaka Thariqul Izzah*, *Al-Azhar Press*, *Khilafah Press* dan lembaga percetakan independen lainnya.

⁷⁰ Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Reviving the Chaliphate in the Nusantara, 613.

⁷¹ Wawancara dengan Miqdad Ali Azka, anggota senior HTI yang berdomisili di Kota Bekasi. Wawancara dilakukan di Bekasi hari Minggu, 17 Mei 2014.

⁷² Hizbut Tahrir Indonesia, "Danlanud Abdulrahman Saleh Malang: Pandangan Hizbut Tahrir Sangat Visioner," <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/06/18/danlanud-abdulrahman-saleh-malang-pandangan-hizbut-tahrir-sangat-visioner/>. Diakses tanggal 19 Juni 2014.

normatif. Mereka hanya memberitakan hubungan antara HTI dan kalangan militer yang dilakukan dalam bentuk silaturahmi maupun audiensi.

Sangat menarik melihat sikap yang ditunjukkan oleh HTI terhadap kalangan militer. Jika oleh sebagian besar gerakan radikal kalangan militer dianggap sebagai lawan yang harus diperangi, maka berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh HTI. Bagi mereka, kalangan militer dianggap sebagai mitra dalam perjuangan. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara HTI, dukungan dari militer menjadi salah satu dari dua syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum tahapan terakhir, yaitu pengambilalihan kekuasaan dan pendirian khilafah, dilaksanakan. Dalam konteks ini, HTI berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh gerakan Islam radikal yang cenderung menganggap kalangan militer sebagai *toghut* yang harus diperangi.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa HTI memobilisasi sumber daya yang dimiliki secara rapi. Mobilisasi internal dilakukan melalui mekanisme pembinaan rutin dan juga diversifikasi sumber daya, sementara mobilisasi eksternal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan organisasional yang diselenggarakan di setiap lapisan organisasi serta melalui aktivitas individu aktifisnya dengan cara berinteraksi dengan masyarakat melalui *ittisal maksudah*. Selain itu, upaya memperluas dan membentuk jaringan juga dilakukan oleh HTI melalui kunjungan-kunjungan kelembagaan ke berbagai pondok pesantren, pengurus masjid dan lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya. Bahkan dalam hal kunjungan, HTI juga tak segan-segan melakukan kunjungan ke aparat pemerintah baik sipil maupun militer.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa HTI menjalankan dua strategi secara bersamaan. Selain menjalankan strategi politik struktural, mereka juga menjalankan strategi sosial kultural dalam menjaga loyalitas dan meningkatkan dukungan masyarakat.

Strategi politik struktural dimainkan HTI dengan melakukan aktivitas politik ekstra parlementer. Mereka secara massif memberikan kritik terhadap setiap kebijakan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga menjadikan isu penerapan syariah dan khilafah sebagai alternatif dalam menyelesaikan segala permasalahan bangsa.

Sementara itu, strategi sosial kultural mereka lakukan dengan mekanisme *halaqah* dan *ittisal maksudah*. Selain itu, mereka juga mempersiapkan kultur masyarakat melalui kegiatan-kegiatan umum seperti konferensi, kajian umum dan kegiatan massal lainnya. Mereka juga memanfaatkan media cetak dan internet untuk mendiseminasikan ide dan pemikiran mereka kepada masyarakat.

Dalam konteks pengambilalihan kekuasaan, dapat dikatakan bahwa HTI meskipun mampu meningkatkan dukungan masyarakat, namun mereka belum mampu mempengaruhi *ahlul quwwah*. Dukungan normatif yang diberikan oleh kalangan militer merupakan sikap yang wajar dan tidak membuktikan bahwa apa yang mereka perjuangkan mendapat dukungan. Dengan demikian, sebagaimana pengakuan Ismail Yusanto yang mengharamkan pengambil alihan kekuasaan jika salah satu unsur belum terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa khilafah yang mereka cita-citakan setidaknya dalam waktu dekat dipastikan tidak dapat terealisasi di bumi NKRI.[]

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Kurniawan. "Hizbut Tahrir Indonesia (Gerakan Politik Ekstra Parlemerter)," dalam *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru, Upaya Merambah Dimensi Baru Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007).
- Arifin, Syamsul. "Agama Sebagai Instrumen Gerakan Sosial," *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 8 No. 1, Maret 2008. 39-71.
- Aziz, M. Imam. "Pengantar Edisi Indonesia I" dalam *Gerakan Sosial Islam, Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, editor Quintan Witorowicz, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Paramadina, Jakarta: Gading Publishing dan Yayasan Wakaf Paramadina, 2012.
- Bakri, Syamsul. "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer.", *DINIKA* Vol.3 no. 1, Januari 2004. 1-12.
- Bayat, Asef. "Fundamentalism, and Sosial Movement Theory," *Third World Quarterly*, Volume 26, nomor 6, 2005.
- Clark, Janine A. "Fundamentalist Women in Yemen: Informal Nodes of Activism," dalam *Islamic Activism: A Sosial Movement Theory Approach*, editor: Quintan Wiktorowicz, Indianapolis: Indiana University Press, 2004.
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Mhyt or Reality?* edisi ketiga. New York: Oxford Universoty Press, 1999.
- Goodwin, Jeff. dan James M. Jasper, "Introduction," dalam *Rethinking Sosial Movements*, editor. Jeff Goodwin dan James M. Jasper, *People, Passions, Power: Sosial Movements, Interest Organizations, and the Political Process*, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Khatib, Lina. "Communicating Islamic Fundamentalism as Global Citizenship," *Journal of Communication Inquiry* 27:4, Oktober 2003. 389-409.
- Kudsi, Syaifudin. "New Islamic Movement: Jejaring Fundamentalisme-Puritanisme-Revivalisme-Islamisme-Radikalisme- dan Terorisme," *REFLEKTIKA* Vol 5. Nopember 2012. 48-72.
- Marshallsay, Zaniah. "Islamic Fundamentalism: Mhyt and Reality Confronted?" Paper dipresentasikan pada Australian Political Studies Association Conference University of Adelaide, 29 September – 1 Oktober 2004.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Pos Kolonial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011.
- McCharty, John D. dan Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Sosial Movement : A Partial Theory", *The American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 Mei 1977.
- Muhammad H. M. S., "Menelisik Sumbangan Fundamentalisme Islam Bagi Kemunculan dan Perkembangan Bank Islam," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume I, Nomor 2, Desember 2004. 37-59.
- Muhtadi, Burhanuddin. "The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia," *Asian Journal of Sosial Science*, 37, 2009.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Argumen Islam untuk Sekulerisme*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Mun'im, Muhtadi Abdul. "Religious Fundamentalism and Dialogue," *REFLEKTIKA Jurnal Keislaman IDIA Prenduan* Vol 5. Nopember 2012. 1-14.
- an-Nabhani, Taqiyudin. *Mafahim Hizb at-Tahrir*, cetakan ke-4 (Beirut: Hizbut Tahrir, 2001).
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia* Jakarta: PSAP 2007
- Okruhlik, Gwenn. "Membuat Perbincangan

- Dijinkan: Islamisme dan Reformasi di Arab Saudi," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. "Reviving the Chaliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and its Impact in Indonesia", *Terrorism and Politic Violence*, 22, tahun 2010.
- Ratnasari, Dwi. "Fundamentalisme Islam," *KOMUNIKA*, Vol 4 No.1 Januari-Juni 2010. 40-57.
- Rijal, Syamsu. "Indoctrinating Muslim Youth: Seeking Certainty Through An-Nabhani", *Al-Jami'ah*, Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432 H.
- Porta, Donatella Della. dan Mario Diani, *Sosial Movement: An Introduction*, edisi kedua, Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmat, M. Imdadun. "Pendahuluan" dalam *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Rijal, Syamsu. "Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota-Kota Makassar Sulawesi Selatan", dalam *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, editor Ahmad Syafi'i Mufid,, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Robinson, Glenn E. "Hamis Sebagai Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012.
- Shalih, Hafizh. *Mengadili Demokrasi*, Cetakan II (Jakarta: Pustaka Thoriqul Izzah, Juni 2010).
- Sidahmeh, Abde Salam. dan Anonshirawan Ehterhami, *Islamic Fundamentalism*, USA: Westview Press 1999.
- Sin, Ray. "Sosial Movement: A Tri Variate Framework," *Sosial Thought and Research*, Volume 30, 2009, 89.
- Tugal, Cihan. "Transforming Everyday Life: Islamism and Sosial Movement Theory", *Theory and Society*, Volume 38, Issue 5, September 2009.
- Wahid, Abdurrahman. Editor, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wickham, Carrie Rosefsky. "Kepentingan, Gagasan, dan Dakwah Kelompok Islamis di Mesir," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor Quintan Wiktorowicz, Penerjemah: Tim Penerjemah Paramadina, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2012.
- Wiktorowicz, Quintan. "Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial," dalam *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, editor: Quintan Wiktorowicz, penerjemah Tim Penerjemah Paramadina, Jakarta: Balai Litbang Agama Departemen Agama, 2012.
- Zallum, Abdul Qodim. *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, penyunting Arief B Iskandar, (Bogor: Al Azhar Press, 2011).
- Zeyno Baran, *Hizb at-Tahrir: Islam's Political Insurgency*, Washington DC: The Nixon Center, 2000.
- Majalah
- Al-Wa'ie, Hizbut Tahrir Indonesia, no. 27 tahun III, 1-30 Nopember 2002
- Al-Wa'ie, Hizbut Tahrir Indonesia, no 82 tahun VII, 1-30 Juni 2007
- Al-Wa'ie, Hizbut Tahrir Indonesia, no 129 tahun XI, 1-31 Mei 2011
- Media Umat, edisi 120, 17-30 Januari 2014.
- Website
- <http://hizbut-tahrir.or.id>
- <http://mediaumat.com>
- <http://republika.co.id>
- Wawancara

Wawancara dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto. Wawancara dilakukan di Jakarta, 10 Maret 2014.

Wawancara dengan Abu Umar. Ketua DPD II HTI Kota Bekasi. Wawancara dilakukan melalui telpon pada tanggal 22 Mei 2014.

Wawancara dengan Miqdad Ali Azka, Anggota Senior HTI Kota Bekasi, dilakukan di Bekasi hari Minggu, 17 Mei 2014.